

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	JENIS PERMOHONAN	JENIS PEMOHON
1.	SEKTOR PENATAAN RUANG	Izin Pemanfaatan Ruang	Baru Penambahan Waktu Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha • Pemerintahan/ Instansi
2.	SEKTOR KESEHATAN	1. Laboratorium Klinik Umum Madya 2. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 3. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi 4. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B 6. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B	Baru Perpanjangan Perubahan Baru Perubahan Baru Perpanjangan Perubahan Baru Perpanjangan Perubahan Baru Baru Perpanjangan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha

		7. Penutupan / Pencabutan Izin Sarana Kefarmasian		
3.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas 2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Reklame, Billboard, Megatron / Videotron 3. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Jalan Keluar Masuk (JKM)	Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha
4.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan 2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 3. Izin Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air 4. Izin Mengubah Aliran dan/atau Alur Sungai / Saluran 5. Izin Mendirikan, Mengubah, dan Membongkar Prasarana Sumber Daya Air	Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan Baru Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha
5.	SEKTOR PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan 3. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	Baru Perpanjangan Penambahan Armada/Frekuensi/Perubahan Penggantian SKIT Rusak / Hilang Baru Perubahan Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha • Pemerintahan / Instansi

		<p>4. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Baru</p> <p>5. Izin Usaha Tally Baru</p> <p>6. Izin Usaha Pelayaran Rakyat</p> <p>7. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Baru</p> <p>8. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>9. Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi;</p> <p>10. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi dan pelabuhan internasional;</p> <p>11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;</p> <p>12. Izin Usaha angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</p> <p>13. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;</p> <p>14. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Pengumpan Regional;</p> <p>15. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan</p>	<p>Perubahan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p>	
--	--	--	--	--

Pengumpulan Regional;

16. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;
17. Izin Usaha Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
18. Izin Usaha Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
19. Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional;
20. Rekomendasi Penetapan Lokasi terminal Khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
21. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
22. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpul dan Utama dengan Keterpaduan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi;
23. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
24. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
25. Izin Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi;
26. Izin Perpanjangan Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal angkutan Penyeberangan Lintas antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi;
27. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpulan Regional;
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
29. Izin Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta

		<p>Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan</p> <p>30. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>		
6.	SEKTOR SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) 3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 4. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Orsos/Yayasan/LSM-UKS/LKS 5. Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Orsos/Yayasan/LSM-UKS/LKS 		<ul style="list-style-type: none"> • Kepanitiaan • Badan Usaha • LKS
7.	SEKTOR TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi Notifikasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Izin Usaha Perusahaan Penerimaan Pemborongan Pekerjaan 3. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha
8.	SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha
9.	SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Pramuwisata (Lisensi Pramuwisata) Baru 2. Rekomendasi Izin Penyelenggara Haji Khusus 	<p>Baru Perubahan Perpanjangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha

		<p>antar Provinsi dan Pulau</p> <p>9. Izin pemasukan data atau pengeluaran Bibit/Benih Semen Baku antar Provinsi dan Pulau</p> <p>10. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Telur Tetas antar Provinsi dan Pulau</p> <p>11. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi dan Pulau</p> <p>12. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Unggas antar Provinsi dan Pulau</p> <p>13. Izin Usaha Distributor Obat Hewan</p> <p>14. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi dan Pulau</p>		
12.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</p> <p>2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya</p> <p>3. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan</p> <p>4. Surat Izin Usaha Pemasaran Ikan</p> <p>5. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan</p> <p>6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <p>7. Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI)</p> <p>8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI-I-PT)</p> <p>9. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-A)</p> <p>10. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)</p> <p>11. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)</p> <p>12. Surat Izin Lokasi</p> <p>13. Surat Izin Pengelolaan</p> <p>14. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan</p>	<p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Penggantian</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Perpanjangan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Perpanjangan</p> <p>Baru</p> <p>Perubahan</p> <p>Perpanjangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha • Pemerintahan / Instansi

13.	SEKTOR KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas kurang dari 6.000m³/Tahun 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) skala Kecil, Menengah dan Besar 3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 4. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan 5. Rekomendasi/Pertimbangan dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan 6. Penetapan Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 	<p>Baru Perubahan Administrasi Perluasan Perubahan Komposisi Perubahan Mesin Pencabutan</p> <p>Baru Perluasan Perubahan Pencabutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha • Pemerintahan / Instansi
14.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<p><i>a. Sub Urusan Geologi/Air Tanah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran (SIP) Sumur Eksplorasi 2. Izin Pengeboran (SIP) Sumur Produksi 3. Izin Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa SIP 4. Izin Sumur Pasak 5. Izin Sumur Gali 6. Izin Perpanjangan Sipa Sumur Bor/Sumur Gali/Sumur Pasak 7. Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah (Sumur Bor) 8. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Baru 9. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Perpanjangan 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha

		<p><i>b. Sub Urusan Ketenagalistrikan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkitan Listrik 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik 3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik 4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi 6. Izin Operasi 7. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 8. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 		
15.	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) 2. Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol 		<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Badan Usaha
16.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan Non OSS 2. Izin Lingkungan OSS 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa kegiatan Pengumpulan Limbah (Pengumpulan B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi) 4. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Nasional 	<p>Baru Perubahan Baru Perubahan</p> <p>Baru Perubahan</p> <p>Baru Perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha
17.	SEKTOR PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan - Budidaya 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan 3. Rekomendasi Izin Usaha perkebunan 4. Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan 		
18.	SEKTOR PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Bidang Pendidikan Menengah jenjang SMA</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Sekolah; 2. Izin Operasional Sekolah Baru; 3. Izin Operasional Sekolah Perpanjangan SMA 4. Izin Perubahan Nama Lembaga / Nomenklatur SMA b. <i>Bidang Pendidikan Menengah jenjang SMK</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Sekolah dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Swasta 2. Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru SMK Swasta 3. Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta 4. Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 5. Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru SMK Negeri c. <i>Bidang Pendidikan Khusus</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 2. Izin Operasional Baru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 3. Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha • Pemerintahan / Instansi

		4. Izin Perubahan Nama Lembaga / Nomenklatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus		
--	--	--	--	--

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA